



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Purwanto

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Imam Suyudi

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah

Imam Suyudi
NIP 196312071987031001

Medan, 6 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Purwanto
NIP 196204011983031001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA UTARA DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan	3,15
2.	Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76,61
		2. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		4. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		5. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya perencanaan hukum, pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi hukum	1. Persentase hasil pemantauan dan peninjauan/ analisis dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang dimanfaatkan oleh pembuat kebijakan	20%
		2. Persentase jumlah RUU prakarsa pemerintah dalam Prolegnas Jangka Menengah 2020-2024 yang masuk kedalam Prolegnas Prioritas Tahunan	20%
2.	Terwujudnya Kesadaran dan Pemahaman Hukum	1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dokumentasi hukum	76.61
		2. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		3. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		4. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76.61

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Fasilitasi perencanaan serta pemantauan dan peninjauan/analisis dan evaluasi produk hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan
2.	Meningkatnya kesadaran hukum serta terpenuhinya akses keadilan dan informasi hukum masyarakat di wilayah	1. Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%
		2. Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%
		3. Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61
		4. Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%
		5. Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%

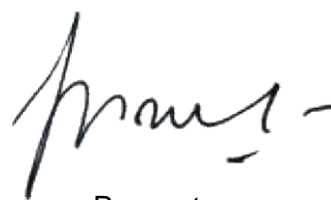
Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp. 148.171.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp. 148.171.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp. 3.800.955.000,-
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	Rp. 3.800.955.000,-

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah



Imam Suyudi
NIP 196312071987031001

Medan, 6 Januari 2022
Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM



Purwanto
NIP 196204011983031001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
SUMATERA UTARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Purwanto

Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Medan, 6 Januari 2022
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM

Purwanto
NIP 196204011983031001